

KOMUNIKASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERANG

Lusiana Laras Kristanti

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : lusianalarask@gmail.com

Nurprapti Wahyu

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ail Muldi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Indonesia belakangan ini terus dihebohkan dengan segelintir peristiwa bencana alam yang melanda. Kondisi geografis menyebabkan Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana alam yang tinggi. 29 dari 100% kejadian bencana tiap tahunnya merupakan bencana banjir. Deru banjir memang tidak bisa dihindari ataupun dicegah kedatangannya. Oleh sebab itu, manusia hanya dapat bertindak mengurangi risiko akibat banjir mulai dari korban jiwa hingga kerugian akibat banjir, dengan melakukan kegiatan preventif. Komunikasi mendukung tercapainya pengurangan risiko bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktor, analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan dalam empat dimensi komunikasi, yaitu penemuan fakta komunikasi yang dilakukan melalui proses survei. Selanjutnya, perencanaan komunikasi dilakukan dengan mengusulkan program kerja yang kemudian dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Berikutnya, pelaksanaan komunikasi dilakukan dengan komunikasi tatap muka dengan media pendukung berupa media cetak brosur dan pamflet, serta brosur dan banner, juga media online website BPBD Kabupaten Serang. Terakhir, evaluasi dilakukan dalam rapat dan peninjauan kembali daerah tempat pelaksanaan program kerja. BPBD Kabupaten Serang sebagai aktor utama penyelenggara, menjalankan komunikasi bersama aktor komunikasi lainnya yaitu, pengurus media massa, korporasi industri, serta masyarakat.

Kata kunci: Komunikasi Risiko, Komunikasi Bencana, Banjir, Pengurangan Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Serang.

COMMUNICATION OF FLOOD RISK REDUCTION IN SERANG DISTRICT.

ABSTRACT

A Indonesia has recently been shocked by a natural disaster that have hit various regions of Indonesia. Geographical condition cause this country have a high potential for natural disaster. Based on the latest 10 years disaster occurrence data that released by the National Disaster Management Agency's Data Center, floods are the most common disaster in Indonesia. 29 of 100% occurrences of disasters each year are floods. Flood cannot be inevitable or prevented. Therefore, humans only can act to reduce the risk due to flood by carrying out preventive activities. Communication supports the achievement of a reduction in the risk of flood through various communication programs to reduce the risk of flood in Serang district. This study aims to find out actors, situation analysis, planning, implementation, and communication evaluation of risk reduction for flood in Serang district. The results showed that the process of communication disaster risk reduction in Serang district, showed in four dimension of risk reduction communication. There are, fact finding, planning, implementation, and evaluation. Fact finding communication conducting a survey, while the communication planning is carried out by proposing a work program, and then the work program contained in the budgeted implementation document, in this document there are compilation of communication messages, that arranged in an informative, educative and persuasive manner and a participatory communication strategy. The implementation of communication is done with face-to-face communication and supporting media, there is the print media in the form of brochure and pamphlet, out door media, in the form of brochures and banners, and the online media, website of BPBD Serang district. Evaluation is carried out in an internal meeting of organizing committee, monthly meetings, and a review of the areas where the work program is implemented.

Keyword: Risk Communication, Disaster Communication, Flood, Flood Risk Reduction, BPBD Serang District

PENDAHULUAN

Gejolak bencana alam yang masif menjadi perbincangan di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini. Hal ini seakan mengingatkan kembali bahwa disadari atau tidak, masyarakat Indonesia memang hidup ditengah deretan potensi bencana. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana alam yang tinggi Banjir menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia.

Data kejadian bencana yang dimuat dalam laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, menyebutkan bahwa terdapat peningkatan terjadinya bencana banjir yang fluktuatif dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Tahun 2008 sebanyak 426 bencana banjir yang terjadi di Indonesia, selanjutnya pada tahun 2009 meningkat sebanyak 488 kali. Tahun 2010 meningkat tajam sebanyak 1059 bencana banjir. Tahun 2011 hingga 2016 terjadi peningkatan yang stabil berturut-turut setiap tahunnya. Sebanyak 573, 584, 592, 596, 598 kejadian yang terjadi hingga tahun 2016. Terakhir pada tahun 2017 sebanyak 824 kali kejadian bencana banjir di Indonesia.

Berdasarkan data yang dimuat dalam bnpb.go.id diatas, dapat disimpulkan

bahwa deru banjir telah menjadi bencana rutin setiap tahunnya. Setiap tahun hampir sebagian besar wilayah di Indonesia selalu dilanda bencana banjir, mulai dari Pulau Sumatra (Nangro Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Jambi, Riau, dan Lampung), Pulau Jawa (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi (Sulawesi Utara), hingga Papua.

Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang juga memiliki potensi rawan bencana banjir (Masterplan BPBD Kabupaten Serang, 2017). Ancaman banjir masih menghantui sejumlah wilayah di Banten, salah satunya Kabupaten Serang. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BNPB mengenai jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Serang yang terus meningkat sebesar 37% tiap tahunnya. Hingga pada pertengahan tahun 2017, sudah terdapat 94 kejadian bencana banjir.

Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Selain itu, semakin padatnya pemukiman

penduduk yang menyebabkan penyempitan aliran sungai, musim pasang air laut, serta kurangnya tahan resapan juga menjadi beberapa penyebab banjir.

Dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir mulai dari rusaknya fasilitas pemukiman, fasilitas umum bahkan memakan korban jiwa. Berdasarkan data arsip PUSDALOPS Provinsi Banten yang dimuat dalam Laporan Bencana Banjir 2017, terdapat beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa banjir yang terjadi pada periode Desember 2016 sampai dengan Maret 2017. Bencana banjir yang terjadi pada periode tersebut berdampak pada 29 Kecamatan dan 88 Desa dengan 22.389 kepala keluarga dengan jumlah 79.091 jiwa sebagai korban, 3 orang diantaranya sebagai korban yang meninggal, dan kerusakan yang tercatat adalah Rp. 49.836.510.000,00. Selain itu, data BNPB pusat menunjukkan peningkatan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir di Indonesia selama tahun 2016 hingga 2017. Terdapat 180 korban meninggal dunia pada tahun 2017, 20% lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Besarnya risiko akibat banjir mendorong perlunya tata kelola risiko yang melibatkan aktor-aktor komunikasi. Pengelolaan risiko bencana menjadi

keharusan yang mutlak direnungkan oleh segenap elemen masyarakat. Kerugian yang semakin meningkat setiap tahunnya membutuhkan upaya penanggulangan sebagai salah satu upaya preventif terhadap bencana banjir. Penanggulangan bencana dalam tahap pra bencana atau sebelum terjadinya bencana dimaksudkan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kerugian dalam bencana.

Kegiatan pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi risiko akibat bencana alam yang terjadi. Bencana alam merupakan bencana yang tidak bisa dihindari maupun dicegah oleh manusia. Oleh sebab itu, manusia bertindak untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir dengan melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Komunikasi menjadi salah satu bidang yang mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana.

Komunikasi mendukung tercapainya pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang melalui berbagai kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang dalam empat dimensi komunikasi yaitu penemuan fakta, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Riset Park dan Sohn (2013) menjelaskan bahwa untuk menciptakan komunikasi risiko yang efektif harus ada kolaborasi dan komunikasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, para ahli, dan industri terkait. Komunikasi risiko dalam pengurangan risiko bencana di pedesaan diposisikan sebagai dialog dan pertukaran pengetahuan untuk mempermudah pemahaman risiko dan pengambilan keputusan. Rekomendasinya perlu membangun kekuatan yang ada di masyarakat, dengan organisasi lokal, penggunaan media setempat, memberdayakan organisasi lokal dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Komunikasi risiko harus dapat menjelaskan konsep ketidakpastian sebuah risiko serta membangun kredibilitas sumber informasi (Renn, 2003). Komunikasi harus terbuka, interaktif dan transparan. Karakteristik risiko yang diperoleh dari penilaian risiko, cara mengendalikan risiko, dan kebijakan yang akan diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait, sehingga semua pihak memperoleh informasi yang cukup mengenai bahaya, cara pencegahan serta

tindakan yang harus dilakukan.

Tujuan komunikasi risiko salah satunya untuk memberikan informasi yang bermakna, relevan dan akurat dalam istilah yang jelas dan mudah dipahami kepada audiens tertentu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai persoalan spesifik yang harus dipertimbangkan oleh semua peserta selama proses analisis risiko. Selain itu juga dalam rangk meningkatkan konsistensi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan manajemen risiko dan implementasinya, memberikan landasan yang aman untuk memahami keputusan manajemen risiko yang diusulkan atau diimplementasikan, meningkatkan keseluruhan keefektifan dan efisiensi proses analisis risiko. Terakhir, turut memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyampaian program informasi dan pendidikan yang efektif jika kedua hal tersebut terpilih sebagai pilihan manajemen risiko.

Komunikasi risiko termasuk salah satu cara untuk melindungi dan mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat. Komunikasi risiko merupakan kebutuhan bersama para pembuat kebijakan. Komunikasi terkait informasi risiko ini menjadi elemen penting dalam tata kelola risiko yang menyangkut berbagai

pemangku kepentingan. Dengan adanya komunikasi risiko akan terjadi pertukaran penilaian, perkiraan, dan pendapat tentang bahaya dan risiko di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (Renn, 2008).

Pemerintah menyatakan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah.

BPBD Kabupaten Serang adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. BPBD bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. BPBD Kabupaten Serang ini lah yang mengkoordinasi semua

perangkat daerah, lembaga atau pihak lainnya dalam menanggulangi pra, pada saat, dan pasca bencana. Lembaga atau pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana dan memberikan bantuan ini meliputi Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Kepolisian, Palang Merah Indonesia (PMI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan Umum (PU), dan Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Relevansi komunikasi risiko dengan pencegahan diperkuat oleh pandangan sosiolog ekologis Ulrich Beck tentang masyarakat risiko (risk society). Risiko adalah nyata dan tidak nyata. Disatu sisi, banyak bahaya dan kerusakan yang sudah nyata sekarang ini: pencemaran air, pemusnahan hutan, munculnya penyakit baru, dan seterusnya. Disisi lain, dorongan sosial aktual dari risiko terletak pada bahaya yang diproyeksi di masa depan.

Penelitian komunikasi dengan tema pengurangan risiko bencana belum banyak dilakukan. Penelitian sosial selama ini sebagian besar membahas masalah kebijakan, sosiologi, manajemen, dan pemberdayaan.

Salah satu penelitian yang membahas komunikasi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir adalah manajemen komunikasi BPBD terhadap bencana banjir

di Kabupaten Kampar (Saputra, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan-tahapan manajemen komunikasi kedalam sistem kegiatan di organisasi. Sedangkan penelitian yang peneliti ambil ini bertujuan untuk menganalisis implementasi proses perencanaan komunikasi Cutlip dan Center dalam pelaksanaan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi lembaga pemerintah penyelenggara kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, beserta aktor komunikasi pengurangan risiko bencana lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Serang pada Maret sampai Oktober 2018. Penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan yang diperoleh dari sumber informasi secara rinci dalam latar yang alamiah. Penelitian kualitatif mengumpulkan data di lapangan dengan mengamati secara mendalam orang yang diteliti, dan menganalisis datanya secara induktif untuk menetapkan pola atau tema. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu

masalah, bukan sekedar mendeskripsikan bagian permukaan sampel dari populasi besar.

Data primer dikumpulkan dari informan penelitian melalui wawancara semi-terstruktur terhadap komunikator dan komunikasi program pengurangan risiko bencana banjir, yang terdiri dari: (1) Pemerintah, yaitu BPBD Kabupaten Serang, (2) Masyarakat, yaitu Relawan, Tokoh masyarakat, dan masyarakat desa terdampak bencana. Hasil wawancara kemudian dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumen.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan transkripsi hasil wawancara. Proses selanjutnya adalah penggabungan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi sehingga data lebih lengkap.

PEMBAHASAN

BPBD Kabupaten Serang merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang, terdapat program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana. Komunikasi pengurangan risiko bencana

banjir dilakukan dalam beberapa program kerja bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Program kerja komunikasi pengurangan bencana banjir terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan.. Program kerja bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang kemudian dikelompokkan dalam empat bagian besar kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di BPBD Kabupaten Serang, yaitu sosialisasi dan simulasi, pembentukan relawan bencana, penyebaran informasi melalui media massa, dan koordinasi dengan instansi lain.

Penemuan Fakta Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Komunikasi pengurangan risiko banjir dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setiap daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Kegiatan pengurangan risiko bencana banjir merupakan salah satu bentuk kegiatan penanggulangan bencana dalam kategori pra-bencana. Oleh sebab itu, BPBD setiap daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana. Begitu pula dengan BPBD Kabupaten Serang.

Langkah pertama dari proses komunikasi pengurangan risiko bencana ini mencakup penyelidikan dan pemantauan pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada langkah ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya.

Penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir memerlukan data yang jelas dan terukur. Data mengenai daerah rawan bencana, curah hujan, jumlah masyarakat, serta riwayat kejadian bencana banjir. BPBD Kabupaten Serang membuat *masterplan* yang berisi data mengenai daerah rawan bencana banjir, statistic jumlah korban bencana banjir, jumlah penduduk setiap daerah dan data fasilitas penanggulangan bencana banjir disetiap kecamatan di Kabupaten Serang. BPBD membuat *masterplan* panduan penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir. *masterplan* dibuat dalam bentuk buku dan di berikan kepada setiap kecamatan di Kabupaten Serang. Masterplan BPBD Kabupaten Serang berbentuk beberapa buah buku yang berisi data mengenai hasil pemantauan daerah rawan bencana di Kabupaten Serang,

rencana kontijensi bencana banjir di Kabupaten Serang, serta peta rawan bencana banjir di Kabupaten Serang.

Proses penemuan fakta komunikasi dilakukan melalui survei dilakukan oleh beberapa staff dan pejabat bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang, yang kemudian disebut sebagai tim survei. Proses survei yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan dan masyarakat daerah pelaksanaan program kerja. Target sasaran program kerja BPBD Kabupaten Serang merupakan masyarakat umum Kabupaten Serang terutama masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana, sehingga perlu dilakukan penemuan fakta dilapangan terlebih dahulu dalam menyusun program kerjanya. Survei yang dilakukan mengenai daerah rawan banjir, kebutuhan masyarakat daerah rawan banjir, jumlah korban dan kerugian akibat banjir, kejadian banjir terakhir, intensitas kejadian banjir, dan lain-lain. Survei tersebut bertujuan untuk menentukan program kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penemuan fakta komunikasi menghasilkan informasi yang akan digunakan BPBD Kabupaten Serang untuk menyusun *masterplan* dan program kerja

pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang. Informasi yang dihasilkan dalam penemuan fakta untuk pembuatan *masterplan* bencana banjir tersebut terdiri dari jumlah penduduk dari setiap Kecamatan, jumlah pemukiman warga dari setiap Kecamatan, jumlah sarana sosial (sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan), sarana perekonomian (sawah, peternakan, tambak), sarana pemerintahan (kantor camat, kantor desa dan balai desa), rekapitulasi bencana banjir pertahun, jumlah kerusakan sarana prasarana serta korban jiwa akibat banjir pertahun dari tiap Kecamatan, tempat evakuasi sementara yang terdapat di setiap Kecamatan, dan peralatan evakuasi di setiap Kecamatan. Selain itu, penyusunan program kerja juga memerlukan penemuan fakta terlebih dahulu. Informasi yang dikumpulkan dalam penemuan fakta komunikasi untuk penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang antara lain jumlah korban bencana dan kerusakan akibat bencana yang terjadi, jumlah penduduk terdampak bencana banjir, sarana prasarana penunjang kegiatan evakuasi bencana, serta budaya masyarakat.

Menurut Anne Gregory (2001), dalam buku *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relation*, untuk

membantu mengenali lingkungan eksternal, digunakan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi). Analisis PEST pada penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang dimulai dengan melihat faktor politik.. Faktor politik dalam penyusunan program kerja BPBD Kabupaten terdiri dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keduanya merupakan dasar hukum dari penyelenggaraan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Berdasarkan aturan tersebut, maka BPBD Kabupaten Serang menyelenggarakan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Faktor ekonomi dalam penyusunan *masterplan* dan penyusunan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir adalah ketersediaan jumlah anggaran BPBD Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program kerja. Selain itu, data kerusakan fasilitas-fasilitas akibat banjir di daerah-daerah Kabupaten Serang juga menjadi salah satu pertimbangan

penyusunan *masterplan* dan program kerja, hal ini membantu BPBD Kabupaten Serang dalam menentukan lokasi penyelenggaraan program kerja pada lokasi terdampak terparah. Banyaknya fasilitas masyarakat maupun umum akibat bencana banjir menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar yang menurun, akibat banyaknya kerusakan fasilitas, bahkan kerusakan tempat yang dimanfaatkan menjadi tempat usaha masyarakat.

Faktor sosial dalam penyusunan program pengurangan risiko bencana banjir adalah kondisi geografis setiap daerah rawan bencana di Kabupaten Serang. Hal ini bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan *masterplan* dan juga penentuan lokasi penyelenggaraan program kerja. Selain itu, rekapitulasi bencana banjir di daerah-daerah di Kabupaten Serang beserta potensi penyebabnya juga menjadi faktor sosial yang bertujuan untuk mempermudah penentuan jenis program kerja berdasarkan faktor penyebab kejadian banjir yang paling banyak terjadi. Adanya sebutan daerah rawan bencana menyebabkan dampak pada kehidupan sosial masyarakat daerah setempat. Masyarakat menjadi lebih waspada ketika musim penghujan

tiba.

Selanjutnya faktor teknologi, berupa data ketersediaan bantuan peralatan evakuasi. Hal ini sangat berguna untuk menentukan program yang akan disusun, serta membantu dalam penyediaan bantuan peralatan yang belum tersedia di daerah rawan bencana. selanjutnya ketersediaan tempat evakuasi sementara disetiap daerah rawan bencana banjir. Hal ini penting, karena menjadi salah satu materi yang akan dijelaskan dalam program pengurangan risiko bencana banjir. Jumlah peralatan dan tempat evakuasi menunjukkan tingkat kelayakan daerah untuk menjadi daerah prioritas penyelenggaraan komunikasi peengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir didahului dengan proses perencanaan. Proses perencanaan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara kegiatan komunikasi PRB. Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan yang

dilakukan BPBD Kabupaten Serang meliputi perencanaan teknis dan non teknis. Proses perencanaan non-teknis dimulai dengan melakukan survei terhadap daerah-daerah rawan banjir yang menjadi target utama pelaksanaan kegiatan komunikasi PRB. Tim yang dibentuk BPBD Kabupaten Serang melakukan survei mengenai daerah rawan banjir, kebutuhan masyarakat daerah rawan banjir, jumlah korban dan kerugian akibat banjir, kejadian banjir terakhir, intensitas kejadian banjir, dan lain-lain. Hasil survei tersebut akan menjadi bahan pertimbangan perumusan program PRB pada rapat internal bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Hingga akhirnya diajukan dan disahkan dalam bentuk DPA.

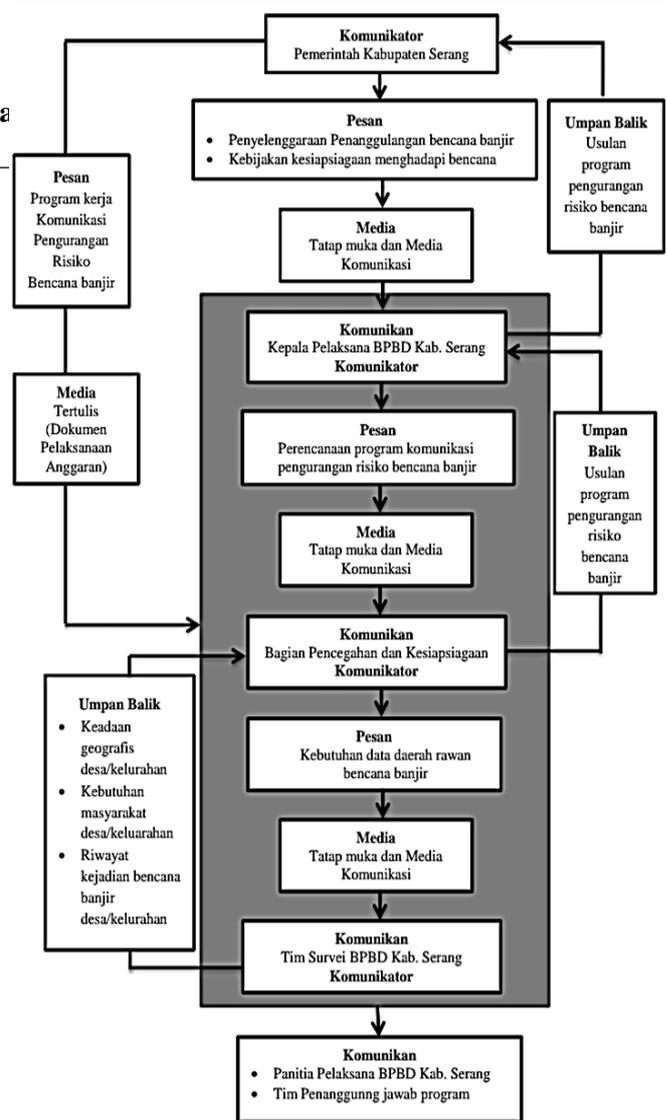
Persiapan teknis yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang dimulai dengan pembentukan panitia pelaksana. Panitia pelaksana kemudian melakukan persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Persiapan yang dilakukan terdiri dari perumusan konsep, pesan komunikasi, penyampaian pesan, dan pembagian kerja, manajemen anggaran, persiapan lokasi kegiatan serta media pendukung kegiatan dan mitra kegiatan.

Komunikasi Pengurangan

Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses, dimulai dengan perkiraan yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang, yaitu melalui proses pembuatan peta rawan bencana, mendata daerah-daerah rawan bencana banjir beserta jumlah korban jiwa dan kerugian akibat bencana banjir. Berdasarkan data yang ada, dilakukan perhitungan daerah yang paling membutuhkan tindakan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir hingga desa yang tidak terlalu terdampak bencana. Perhitungan tersebut kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program dan lokasi kegiatan.

Proses perencanaan dilanjutkan dengan penentuan tujuan, tujuan utama dari setiap kegiatan komunikasi PRB yang dibuat BPBD Kabupaten Serang yaitu untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir di daerah-daerah di Kabupaten Serang. Juga untuk membuat masyarakat Kabupaten Serang menjadi masyarakat yang sadar bencana, dan mandiri dalam penanggulangan bencana. Intinya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Proses perencanaan memerlukan penentuan sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan program pengurangan



Gambar 1. Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir
Sumber : peneliti, 2018.

risiko bencana banjir. Yang diperlukan dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana banjir antara lain anggaran dana, peralatan dan fasilitas, serta sumber daya manusia. Anggaran dana dalam kegiatan komunikasi PRB bersumber dari pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Serang. Anggaran dana kegiatan diusulkan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada Pemerintah daerah melalui BAPPEDA bersamaan dengan pengusulan program kerja.

Berdasarkan prinsip komunikasi risiko yang diungkapkan oleh Leiss (1994), pesan komunikasi dirumuskan sesuai dengan analisis khalayak penerima pesan komunikasi. Khalayak atau sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah rawan bencana banjir, seperti masyarakat di daerah dataran rendah ataupun masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai serta daerah rawan banjir. Dalam kaitannya dengan prinsip komunikasi risiko selanjutnya yang melibatkan pakar ilmiah Program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang digagas oleh BPBD Kabupaten Serang, pengkaji risiko tidak dilakukan oleh pakar ilmiah. Namun sayangnya dalam program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, akademisi tidak terlibat dalam proses pengkajian risiko perumusan program kerja.

Pelaksanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Pelaksanaan program kerja pengurangan risiko bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Serang menggunakan strategi komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif mengedepankan hubungan timbal balik dua arah yang melibatkan

berbagai elemen komunikasi. Partisipasi dari masyarakat dan media massa juga merupakan strategi yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam menjalankan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk membuat program Destana yang merupakan salah satu program pengurangan risiko bencana banjir lebih efektif dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Serang secara luas.

Sihabudin dan Winangsih (2012:37) dalam Komunikasi Antar Manusia, menyebutkan beberapa komponen komunikasi yang terdiri dari komunikator, pesan, media, dan komunikan. Komunikator dalam pelaksanaan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yaitu BPBD Kabupaten Serang. Sebagai komunikator, kredibilitas yang tinggi sangat diperlukan dalam menyampaikan pesan komunikasi. Artinya, BPBD sebagai komunikator kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir memiliki kemampuan dan menguasai bidang penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaan program sosialisasi dan simulasi, komunikator yang dimaksud merupakan pembicara yang menyampaikan pesan komunikasi secara langsung kepada komunikan. Pembicara

dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas serta kesesuaian bidang kerjanya. BPBD Kabupaten Serang memiliki pembicara tidak hanya dari internal BPBD Kabupaten Serang, tetapi juga dari instansi lain, seperti kedinasan maupun Pemerintah daerah, sesuai dengan tema dan topik pembicaraan sosialisasi. Tokoh masyarakat formal dan nonformal juga dilibatkan dalam peneguhan dan pemberian motivasi agar materi yang disampaikan BPBD Kabupaten Serang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada program kerja pembentukan relawan bencana, komunikator yang dimaksud merupakan mereka yang bertugas melakukan pembinaan dan komunikasi secara intens dengan pengurus relawan bencana setiap desa. Komunikator dipilih sesuai dengan bidang kerja dan keahlian dalam bidang pra bencana. Mereka merupakan staff sub bagian pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang.

Program kerja koordinasi dilakukan dengan beberapa instansi atau lembaga. Koordinasi dengan pengurus media atau pers, koordinasi dengan instansi pemerintah, dan koordinasi dengan pengurus industri. Umumnya penunjukkan komunikator berdasarkan bidang kerja yang digelutinya. Komunikator dipilih dari

staff sub bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang.

Dalam memilih komunikator, tingkat kepercayaan komunikator kepada komunikator menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Seorang komunikator dipercaya oleh khalayak, karena didukung oleh unsur kredibilitas, disamping perilaku jujur. Serta kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Salah satu strategi BPBD Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana adalah melibatkan orang yang memiliki pengaruh dikalangan sasaran komunikasi. Dalam sasaran komunikasi masyarakat, komunikator pendukung yang dilibatkan adalah tokoh masyarakat. Dalam dunia industri, yang dilibatkan adalah para pejabat perusahaan. Tokoh masyarakat dipilih karena memiliki kesamaan tinggi dengan komunikator, baik dari aspek bahasa ataupun tempat tinggal. Sedangkan pejabat perusahaan karena memiliki kekuatan dan kekuasaan, seperti karisma, wibawa, otoritas, dan kompetensi atau keahlian.

Selain komunikator, elemen paling penting dalam proses komunikasi adalah pesan komunikasi. Pesan komunikasi dalam setiap program kerja BPBD Kabupaten Serang dimuat dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Struktur dan format pesan disusun oleh panitia pelaksana kegiatan, sesuai dengan sasaran komunikasi.

Pesan komunikasi pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana disusun secara persuasif dan edukatif. Pesan komunikasi disusun secara persuasif yang berarti informasi yang berada didalamnya berisi ajakan. BPBD menyusun pesan secara persuasif dengan tujuan mengajak komunikasi untuk turut serta berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana banjir, contohnya melalui keterlibatannya menjadi relawan, ketersediaannya hadir dan mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Serang, serta turut serta mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pesan juga disusun secara edukatif. Informasi yang dimuat akan memberikan pengetahuan baru bagi siapa saja yang mendapatkannya. Hal ini karena informasi kebencanaan yang akan disampaikan oleh BPBD Kabupaten Serang akan memberi pengetahuan kepada masyarakat atau komunikasi. Pengetahuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir.

Pada program penyebaran informasi melalui media massa, pesan komunikasi

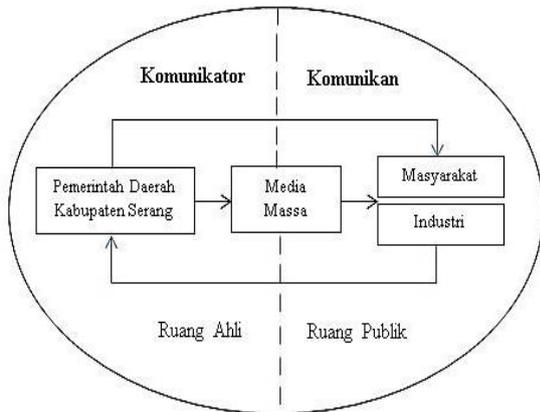
disusun secara informatif. Hal ini karena *press release* yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Serang berisi informasi kebencanaan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang maupun informasi lainnya. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Serang secara umum. Pesan komunikasi dalam program kerja koordinasi dengan instansi lain

disusun secara persuasif. Hal ini karena BPBD Kabupaten Serang berupaya untuk turut serta mengajak instansi lain dalam kegiatan pengurangan risiko bencana banjir.

Selain itu, media juga menjadi komponen penting dalam proses komunikasi. Penyampaian pesan komunikasi dilakukan secara langsung dengan komunikasi tatap muka oleh anggota BPBD Kabupaten Serang. Untuk mendukung pelaksanaannya, digunakan media pendukung dalam mengoptimalkan tersampainya pesan komunikasi kepada komunikasi. Media yang dipilih dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir merupakan media cetak brosur, pamphlet, media luar ruangan spanduk dan banner, media online seperti website BPBD Kabupaten Serang, selain

itu pers dari perusahaan media lokal juga turut meliputi beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang.

Komunikasikan dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir umumnya merupakan masyarakat Kabupaten Serang, namun juga terdapat beberapa komunikan lain, seperti masyarakat industri, pers, instansi pemerintah lain, juga relawan.



Gambar 2. Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir
Sumber : peneliti, 2018.

Evaluasi Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Setelah pelaksanaan program kerja selesai dilakukan, BPBD Kabupaten Serang kemudian melakukan evaluasi dan pengontrolan. Evaluasi atau pengendalian

yang dilakukan merupakan evaluasi kegiatan program kerja yang diselenggarakan melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan. Tujuan utama fungsi pengendalian adalah, agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi komunikasi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Selain itu, pengontrolan terhadap pesan komunikasi dalam program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah dengan kelompok relawan bencana dan relawan industri. Pengontrolan juga dilakukan dengan meninjau ulang daerah-daerah yang tempat pelaksanaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Peninjauan ulang dilakukan dengan tujuan melakukan pengontrolan apakah pesan komunikasi sudah tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Pengawasan terdiri dari tiga tipe,

pertama pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Melihat dalam program pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana proses pengawasan ini masih dalam tahap pelaksanaan program kerja. Pengawasan yang dilakukan meliputi sinkronisasi antara panitia pelaksana dengan pembicara, kelompok relawan pembantu pelaksana, dan media massa.

Kedua, pengawasan yang pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan pasca kegiatan, atau evaluasi. Pengawasan ini terlihat dalam proses program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yaitu dalam rapat internal pasca kegiatan. Hal ini rutin dilakukan pasca selesai melaksanakan program kerja, karena untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan program. Serta mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan program.

Pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan umpan balik. Dalam program komunikasi PRB, BPBD Kabupaten Serang menjalankan evaluasi berupa

peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja untuk melihat apakah pesan komunikasi tersampaikan dengan baik.

Dalam proses evaluasi terdapat pembahasan capaian pelaksanaan program kerja, beserta hambatan yang dihadapi. Hambatan dari pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko di Kabupaten Serang antara lain keterbatasan anggaran dana serta wilayah yang terlalu luas yang tidak bisa dengan cepat dijangkau oleh BPBD Kabupaten Serang.

Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

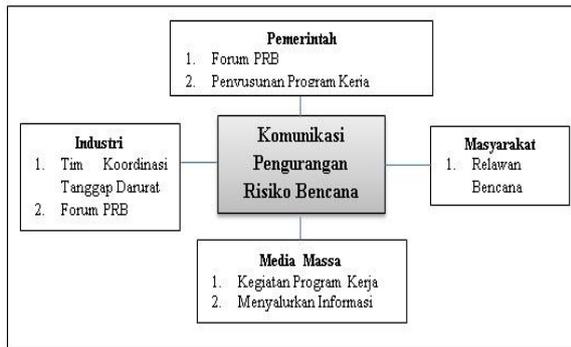
Aktor komunikasi pengurangan risiko bencana atau komunikator pengurangan risiko bencana pada dasarnya merupakan semua orang, kelompok atau instansi yang berkomunikasi guna mengupayakan pengurangan risiko bencana. Aktor dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang dapat dilihat dari beberapa kegiatan komunikasi baik kegiatan formal maupun non formal yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Serang.

Terdapat beberapa aktor komunikasi yang terlibat dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Pertama, pemerintah yang direpresentasikan oleh BPBD Kab. Serang sebagai penyelenggara program

pengurangan risiko bencana banjir. Pemerintah Daerah beserta OPD Kabupaten Serang juga terlibat dalam proses perencanaan program pengurangan risiko bencana banjir. Selain lembaga Pemerintahan, pengurus media massa melalui pers, juga turut terlibat dalam program pengurangan risiko bencana banjir. Pers terlibat dalam penyampaian pesan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Pers diundang oleh BPBD Kab. Serang untuk meliput proses pelaksanaan program Destana untuk kemudian disebar luaskan kepada masyarakat Kab. Serang secara luas. Walaupun tidak disetiap kegiatan pers hadir untuk melakukan peliputan, namun BPBD Kabupaten Serang selalu membuat *press release* yang kemudian akan disebarluaskan kepada pers dari berbagai media, melalui grup *whatsapp*.

Masyarakat juga terlibat dalam program pengurangan risiko bencana banjir. Masyarakat sebagai penerima pesan komunikasi, kemudian memberikan respon balik, salah satunya dengan turut terlibat dalam kelompok relawan bencana. Industri juga turut terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir melalui keterlibatannya dalam TKTD serta FPRB Provinsi Banten.

Jika melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi risiko yang dikemukakan oleh Wiliam Leiss (1944), ada beberapa unsur yang tidak terlibat dalam proses komunikasi program Destana. Komunikasi risiko yang efektif menurut Leiss (1944) melibatkan lima unsur dalam pelaksanaannya. Kelima unsur tersebut diantaranya, Pemerintah, Industri, Media massa, Akademisi, dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir hanya melibatkan 4 dari 5 unsur yang ada, yaitu pemerintah, media massa, industri dan masyarakat. Unsur akademisi tidak terlibat dalam proses komunikasi PRB Hal ini karena unsur akademisi belum banyak melibatkan diri dalam proses pra bencana, mereka lebih banyak terlibat dalam proses saat terjadinya bencana. Peran akademisi memang sangat penting dalam komunikasi pengurangan risiko bencana, baik dalam pengkajian risiko, atau keterlibatannya dalam kelompok relawan. Namun hingga saat ini, belum ada keterlibatan kaum intelektual tersebut terlebih dalam peran pengkajian risiko.



Gambar 3. Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir
Sumber : peneliti, 2018

Berdasarkan prinsip komunikasi risiko yang diungkapkan oleh Leiss (1994), pesan komunikasi dirumuskan sesuai dengan analisis khalayak penerima pesan komunikasi. Pesan komunikasi dalam program pengurangan risiko bencana banjir, dirumuskan melalui beberapa proses yaitu survei lapangan, evaluasi program pengurangan risiko bencana banjir yang telah berjalan, lalu dirumuskan oleh bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang.

Pesan komunikasi dirumuskan dalam bentuk pesan yang bersifat informatif, edukatif, dan persuasif. Informatif terlihat dari pesan yang disampaikan selalu memberikan informasi yang lengkap, terlihat dari pesan yang disampaikan pada program kerja sosialisasi dan simulasi melalui media brosur.

Selain itu, pesan yang disampaikan juga bersifat persuasif. Hal ini terlihat pada

pesan yang disampaikan dalam program kerja sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana. Pesan yang disampaikan terdapat ajakan untuk turut serta menjadi relawan bencana dan melakukan kegiatan yang dapat mendukung pengurangan bencana banjir di daerahnya masing-masing. Selain itu, dalam program kerja koordinasi dengan instansi lain seperti industri, melalui koordinasi dalam TKTD, BPBD Kabupaten Serang berupaya mengajak pengurus TKTD yang merupakan perwakilan perusahaan-perusahaan dalam satu daerah untuk menjadi pioneer utama dalam penanggulangan bencana di daerahnya, juga untuk menjaga lingkungan industri yang sehat. Koordinasi dengan Pemerintah daerah beserta OPD Kabupaten Serang juga dilakukan dengan mengajak semua bagian dari Pemerintahan Kabupaten Serang untuk terlibat dalam penanggulangan bencana banjir melalui apel kesiapsiagaan.

Pesan komunikasi juga bersifat edukatif. Hal ini terlihat pada pesan yang disusun dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi, informasi yang diberikan berupa pengetahuan baru dalam penanggulangan bencana dan dipraktikkan melalui simulasi.

Prinsip komunikasi selanjutnya yaitu pemilihan khalayak dalam program.

Khalayak dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan bencana umumnya masyarakat Kabupaten Serang yang berada di daerah rawan bencana. Alasannya, masyarakat di daerah rawan bencana lebih berpotensi terdampak bencana banjir. Pengetahuan yang baru mengenai kebencanaan banjir sangat diperlukan oleh masyarakat di daerah ini supaya dapat mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana banjir. Selain itu, masyarakat industri juga menjadi khalayak dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana, hal ini karena kawasan industri menjadi daerah penting dalam pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana juga dapat diusahakan dengan melakukan tindakan preventif di daerah industri, seperti menjamin keselamatan daerah industri dari limbah yang tidak pada tempatnya.

Dalam kaitannya dengan prinsip komunikasi risiko selanjutnya yang melibatkan pakar ilmiah. Program kerja pengurangan risiko bencana banjir yang digagas oleh BPBD Kabupaten Serang, pengkaji risiko tidak dilakukan oleh pakar ilmiah. Salah satu tujuan dari adanya keterlibatan pakar ilmiah seperti akademisi adalah untuk membantu melakukan pengkajian risiko. Namun sayangnya dalam program kerja pengurangan risiko

bencana BPBD Kabupaten Serang, belum ada keterlibatan akademisi dalam proses pengkajian risiko.

Prinsip berikutnya, menciptakan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam hal ini komunikator harus dipersiapkan untuk dapat menyampaikan pesan komunikasi sesuai dengan yang dirancang. Komunikator program kerja sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana BPBD Kabupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang menyiapkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk menyampaikan pesan komunikasi risiko, diantaranya yaitu para pimpinan Bidang dan Sub Bidang serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang. Tidak hanya dari BPBD Kabupaten Serang, pembicara yang dipilih juga dari OPD Kabupaten Serang yang sesuai dengan topik bahasan dan memiliki keahlian dibidangnya. Selain itu, komunikator yang juga dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam menyebarluaskan pesan komunikasi risiko ialah para relawan yang berperan sebagai penyambung pesan komunikasi dari BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat di daerahnya, seperti pelatihan penanggulangan bencana, informasi cuaca, informasi kebencanaan hingga bagaimana menanggulangi bencana ketika terjadi bencana banjir.

Pada program kerja koordinasi dengan instansi lain, komunikator yang dipersiapkan harus memahami tentang konsep dan pesan pengurangan risiko bencana yang dirumuskan oleh BPBD Kabupaten Serang. Pejabat atau staff Bagian pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi komunikator utama dalam program tersebut. Sedangkan pada penyebaran informasi, komunikator yang berperan yaitu pembuat *press release*, yaitu Humas dan PUSDALOPS BPBD Kabupaten Serang. Hal ini karena membuat *press release* membutuhkan kemampuan khusus, sehingga pesan yang disampaikan sesuai dan dapat diterima secara maksimal oleh khalayak.

Menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya juga merupakan juga prinsip komunikasi risiko. Menilik kedalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, pihak peenyampai pesan atau komunikator selain kompeten juga harus dapat dipercaya. BPBD Kabupaten Serang sampai saat ini merupakan pihak yang memiliki kredibilitas dimata khalayak karena penanggulangan bencana merupakan bidang penyelenggaraan BPBD Kabupaten Serang. Sebagai strategi yang digunakan, BPBD Kabupaten Serang melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu menyampaikan pesan

komunikasi. Hal ini dipersiapkan BPBD Kabupaten Serang untuk membuat program pengurangan risiko bencana memiliki kredibilitas, dan merupakan sumber informasi satu-satunya dalam hal informasi kebencanaan.

Terakhir, keterbukaan dan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan program komunikasi pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD dalam tingkat Kabupaten saja, tetapi juga tanggung jawab Pengurus Kecamatan, Pengurus Desa, dan relawan serta masyarakat Desa masing-masing.

Program pengurangan risiko bencana banjir dicanangkan oleh BPBD Kabupaten Serang dengan berbagai keterlibatan aktor komunikasi. Keterlibatan 4 aktor utama dalam program pengurangan risiko bencana banjir, yaitu pemerintah, media massa dan masyarakat, memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam proses penyampaian pesan komunikasi.

SIMPULAN

Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai aktor utama komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Selain

itu, aktor komunikasi lain yang terlibat diantaranya Pemerintah daerah beserta SKPD yang selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Serang dalam pembahasan penyusunan rencana program kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, media massa (pers) yang berperan menyebar luaskan pesan komunikasi, industri (pengurus perusahaan) yang berperan menjadi relawan dalam lingkungannya sendiri melalui koordinasi dengan BPBD Kabupaten Serang, masyarakat Kabupaten Serang melalui keterlibatannya dalam kelompok relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang.

Penemuan fakta dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan melalui proses survei dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan *masterplan* dan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Data yang dikumpulkan terdiri dari faktor politik berupa dasar hukum penyelenggaraan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, ekonomi berupa anggaran dana BPBD Kabupaten Serang serta kerusakan fasilitas di daerah akibat bencana banjir, sosial berupa kondisi geografis daerah rawan bencana dan rekapitulasi kejadian bencana banjir setiap Kecamatan, dan

teknologi dalam hal kebencanaan berupa ketersediaan bantuan peralatan evakuasi serta ketersediaan tempat evakuasi sementara setiap daerah di Kabupaten Serang.

Perencanaan komunikasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang dengan menyusun program kerja pengurangan risiko bencana banjir berdasarkan hasil penemuan fakta yang telah dilakukan. Program kerja kemudian diajukan kepada Pemerintah dan dikeluarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), yang terdiri dari empat bentuk program kerja yaitu sosialisasi dan simulasi, pembentukan relawan bencana, koordinasi dengan instansi, dan penyebaran informasi melalui media massa. Perencanaan juga mencakup penyusunan pesan komunikasi dan strategi komunikasi. Pesan komunikasi pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana disusun secara persuasif dan edukatif dengan strategi komunikasi partisipatif, sedangkan pada program. Sedangkan dalam program penyebaran informasi melalui media massa, pesan komunikasi disusun secara informatif dan strategi yang digunakan dengan membuat *press release* yang kemudian diberikan kepada pers dari berbagai media. Pesan komunikasi dalam program kerja koordinasi dengan instansi

lain disusun secara persuasif.

Pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan oleh bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana dilakukan dengan komunikasi tatap muka dengan media pendukung berupa media cetak brosur dan pamflet, serta media luar ruang spanduk dan *banner*. Pada program penyebaran informasi melalui media massa, komunikasi dengan pers dilakukan dengan penyebaran *press release* melalui media sosial whatsapp, selain itu *press release* juga dimuat dalam website BPBD Kabupaten Serang. Sedangkan dalam koordinasi dengan instansi lain, komunikasi dilakukan secara tatap muka.

Evaluasi komunikasi pengurangan risiko bencana banjir pada program sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan bencana dilakukan dalam tiga tahap yaitu melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan, rapat bulanan, dan peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja. Sedangkan dalam program

lainnya, hanya dilakukan evaluasi pada rapat internal bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

BPBD Kabupaten Serang. 2015. *Dokumen Hasil Pemantauan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Serang*.

Gregory, Anne. 2004. *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations, Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Leiss W. 1994. *Risk Communication and Public Knowledge*. Di dalam : Crowley D, Mitchell D, editor. *Communication Theory Today*. California (US): Stanford University Press.

Renn, O. (2008). *Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World*. London : Earthscan.

Sihabudin, Ahmad & Winangsih, Rahmi. 2012. *Komunikasi Antar Manusia*. Serang: Pustaka Getok Tular.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana.

Sumber Online:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2017. Dipetik 18 Februari 2018 dari www.bnpb.go.id : www.bnpb.go.id/home/potensi.html